

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator dari tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apabila pertumbuhan pembangunan suatu wilayah mengalami peningkatan maka laju pertumbuhan perekonomiannya juga akan meningkat dan ketimpangan semakin sedikit. Pada hakekatnya pembangunan perekonomian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi membawa pengaruh terhadap kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Arsyad,2010).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini di sebabkan oleh perekonomian sekitarnya, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan ekspor impor barang dan jasa. Sedangkan faktor internalnya dapat dilihat dari kemampuan wilayah tersebut dalam pengelolaan sektor unggulan dan potensial untuk penopang perekonomian wilayahnya (Alit Pamrihan,2016).

Suparmoko (1991) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak selalu dilihat dari sisi global, karena cara tersebut dianggap kurang mencerminkan keadaan riil perekonomian yang bersangkutan. Lebih jelasnya, harus dikelompokkan atau diperinci menjadi sektor-sektor usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan harus dilakukan, sebab apabila laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan yang tidak sama akan menyebabkan berbagai masalah di wilayah tersebut, termasuk ketimpangan. Tutik Yuliani (2015) menyatakan bahwa ketimpangan yang terjadi akan berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan perekonomian yang berpengaruh pada ketimpangan kemakmuran antar daerah tersebut.

Terfokusnya suatu kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu secara langsung akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar wilayah sehingga akan tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut akan lebih memberikan pendapatan yang tinggi kepada masyarakatnya, sehingga akan relatif makmur. Berbeda dengan wilayah yang tidak menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi yang nantinya akan memberikan pendapatan yang rendah pada masyarakatnya, dan akan berakibat bagi kemakmuran yang relatif rendah. Kesenjangan sering kali terjadi di suatu wilayah dan menjadi permasalahan yang cukup serius. Barika (2012) menyatakan bahwa daerah yang mengalami ketimpangan disebabkan salah satunya kekurangan sumber daya yang tidak dimiliki, karena cenderung para investor memilih daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti halnya yang ada di perkotaan dan tidak ada di pedesaan.

Andy dan Wisnu (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan memperluas kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sedangkan pemerataan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan kemiskinan di daerah tersebut. Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang banyak terjadi di negara Indonesia pada saat ini. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus mempunyai sektor-sektor pendukung yang mampu mengakselerasi pembangunan.

Menurut *World Bank* (2015) kategori ketimpangan dapat menggunakan kriteria yaitu : a) Jika Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk dalam kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi, b) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total terhadap penduduk kurang dari 12-17 persen dikategorikan ketimpangan sedang, c) Apabila jumlah pendapatan penduduk masuk dalam kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan penduduk kurang dari 17 persen dikatakan ketimpangan rendah.

Pada sisi lain, adanya permasalahan tentang kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan tersebut juga akan menimbulkan dampak instabilitas sosial, ketidakpastian, kelaparan, kesehatan, dan gizi yang buruk. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi terus-menerus, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi makro dan kelangsungan pemerintahan yang ada pada saat itu. Ketimpangan pembangunan pada saat ini berwujud dalam berbagai dimensi dan aspek, seperti pendapatan per kapita atau pendapatan daerah wilayah tersebut.

Jawa Tengah adalah provinsi yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Ada banyak masalah yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Masalah tersebut yang membuat pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menghasilkan sebuah tujuan tertentu. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa Pemerintah melakukan kerjasama antar daerah yang memiliki potensi-potensi di kawasannya dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut.

Kabupaten Wonogiri merupakan suatu wilayah yang berada di kawasan eks-Karesidenan Surakarta yang biasa disebut dengan Subosukawonosraten, yang memiliki permasalahan tentang ketidakmerataan pembangunan ekonominya. Dalam hal ini daerah tersebut dapat menjadi alat ukur laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang ada di bawahnya. Kabupaten Wonogiri dalam kawasan tersebut merupakan wilayah yang masih rendah dalam pembagunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonominya (Penulis,2020).

Dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, Kabupaten Wonogiri masih relative kecil dan masih perlu pengembangan pada sector ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 PDRB Eks-Karesidenan Surakarta Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),
Tahun 2016-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten	PDRB ADHK (Juta Rupiah)		
	2016	2017	2018
Sukoharjo	22,847,982	24,163,939	25,564,065
Boyolali	19,139,359	20,248,849	21,406,268
Surakarta	29,975,873	31,685,480	33,506,222
Karanganyar	22,436,293	23,731,952	25,150,277
Wonogiri	17,869,145	18,818,939	19,837,022
Sragen	22,625,821	23,977,207	25,356,459
Klaten	23,725,740	24,993,103	26,360,649
Rata-rata	158,620,213	167,619,469	177,180,962

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2015-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun PDRB setiap Kabupaten mengalami peningkatan. Jumlah Produk Distribusi Regional Bruto terbesar adalah Kabupaten Surakarta sedangkan Kabupaten Wonogiri memiliki Produk Domestik Regional Bruto terendah atau terkecil dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Berdasarkan keterangan di atas bahwa perekonomian terpusat hanya di satu Kabupaten. Hal tersebut menyebabkan ketidak merataan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Wonogiri selama tiga tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 17,869,145 dan selanjutnya pada tahun 2018 naik hingga sebesar 19,837,022, akan tetapi PDRB Kabupaten Wonogiri masih dibawah rata-rata. Identifikasi perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri menurut lapangan usaha tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonogiri Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,23	2,68	2,02
Pertambangan dan Penggalian	1,54	1,42	2,28
Industri Pengolahan	6,80	7,02	6,93
Pengadaan Listrik dan Gas	8,60	6,29	4,55
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,94	6,83	4,36
Konstruksi	6,99	9,91	8,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5,42	5,35	5,53
Transportasi dan Pergudangan	5,95	9,68	9,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,27	6,49	6,08
Informasi dan Komunikasi	8,67	18,26	14,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,87	6,26	6,89
Real Estat	6,80	6,49	4,29
Jasa Perusahaan	10,13	8,73	6,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,62	2,84	2,63
Jasa Pendidikan	7,55	8,56	8,50
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	7,72	9,65	8,90
Jasa Lainnya	6,63	7,17	7,48
Produk Domestik Regional Bruto	5,25	5,32	5,42

Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri Menurut Lapangan Usaha 2014-2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat besarnya Produk Domestik Bruto Regional per tahunnya di Kabupaten Wonogiri. Laju pertumbuhan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 mencapai 5,42 %, yang pertumbuhannya lebih cepat daripada tahun 2017 yang sebesar 5,32 %. Jumlah pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 14,49 % pada tahun 2018, dan paling rendah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebesar 2,02. Dari data di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri masih dapat berkembang dengan baik, namun adanya ketidakmerataan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi menyebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan ini dapat terjadi apabila di Kabupaten Wonogiri terdapat perbedaan sektor-sektor penunjang utama perekonomian.

Kabupaten Wonogiri memiliki 25 Kecamatan yang masing-masing Kecamatan memiliki bidang utama yang menunjang perekonomian. Memiliki Kecamatan yang banyak merupakan tugas yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan agar masyarakat memiliki pendapatan yang merata. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat melakukan evaluasi atau pengkajian khusus untuk menangani masalah-masalah dalam pembangunan perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan juga perlu dilakukan agar tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, tanpa adanya ketidakmerataan pada masyarakat. Kontribusi di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri juga diperlukan dilakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang. Identifikasi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tiap Kecamatan di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dalam Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 PDRB Per Kapita Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No	Kecamatan	2016	2017	2018
1	Pracimantoro	1.001.314,65	1.047.789,98	1.108.114,20
2	Paranggupito	273.360,69	285.705,36	298.234,61
3	Giritontro	279.900,34	295.912,26	308.500,14
4	Giriwoyo	555.390,36	580.393,06	605.126,46
5	Batuwarno	312.476,20	321.599,10	332.644,23
6	Karangtengah	501.907,94	517.689,76	533.254,49
7	Tirtomoyo	781.562,98	820.941,38	867.211,01
8	Nguntoronadi	299.199,58	310.966,54	324.049,05
9	Baturetno	859.825,70	910.435,79	964.647,84
10	Eromoko	648.892,43	670.445,15	707.405,57
11	Wuryantoro	528.644,29	557.352,71	587.777,26
12	Manyaran	500.451,75	530.122,71	562.850,88
13	Selogiri	1.283.734,32	1.362.579,54	1.445.982,40
14	Wonogiri	2.467.796,55	2.636.991,76	2.809.817,63
15	Ngadirojo	1.288.453,77	1.367.016,00	1.432.461,61
16	Sidoharjo	842.157,18	889.361,92	932.985,52
17	Jatiroto	435.448,64	450.138,77	472.067,13
18	Kismantoro	482.596,57	506.277,62	532.370,53
19	Purwantoro	878.304,97	922.569,10	977.297,12
20	Bulukerto	399.775,96	419.890,52	443.354,17
21	Puhpelem	309.526,78	321.931,09	335.168,95
22	Slogohimo	654.269,45	687.093,21	719.800,95
23	Jatisrono	1.275.630,03	1.349.670,73	1.435.709,03
24	Jatipurno	424.280,77	447.912,06	465.147,51
25	Girimarto	584.243,51	609.711,66	637.060,54
Kabupaten Wonogiri		17.869.145,42	18.820.497,77	19.839.038,83

Sumber : Dinas KOMINFO Wonogiri, 2016-2018

Tabel data PDRB perkapita kecamatan di atas, pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan ada yang tinggi, ada pula yang rendah. PDRB tertinggi berada di Kecamatan Wonogiri sebesar 2.467.796,55 pada tahun 2016 dan terendah terdapat di Kecamatan Paranggupito sebesar 273.360,69. Tahun 2017 pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Wonogiri dengan nilai PDRB sebesar 2.636.991,76 dan terendah terdapat di Kecamatan Paranggupito sebesar 285.705,36. Sampai saat ini masih ada tiga

kecamatan di Wonogiri masuk zona merah kemiskinan. Pasalnya, di tiga kecamatan itu masih banyak ditemukan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). “Ada Puhpelem, Paranggupito, dan Pracimantoro faktor utama yang menentukan kemiskinan, yakni kurangnya pengetahuan mengenai potensi kecamatan dan tidak meratanya pembangunan” kata Kepala Dinas Sosial Wonogiri (Jawa Pos, 2019).

Tabel 1.3 dapat dilihat dalam kurun waktu tahun 2016-2018 pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dapat diketahui bahwa kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan memiliki pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lain. Setiap daerah perlu mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayah terutama berbasis keunggulan lokal. Identifikasi potensi wilayah merupakan aktivitas mengenal, memahami dan merinci secara keseluruhan potensi (SDA & SDM) yang dimiliki wilayah baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan dan atau wilayah lain. Bagaimana suatu daerah melakukan penggalan atas sumber-sumber daya yang dimilikinya, sehingga daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi unggul.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar daerah yaitu dengan penerapan kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan strategis, sehingga upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan, tetapi kesenjangan antar daerah diharapkan dapat dipersempit. Pengelompokan dilakukan sebagai salah satu strategi dasar dalam melakukan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah. Diharapkan dengan adanya pembagian ini, masing – masing daerah dalam suatu kawasan kerjasama akan saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Untuk memperoleh hasil dan manfaat yang besar mendorong laju pertumbuhan daerah berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2040 telah mengarahkan bahwa untuk pemerataan pembangunan

wilayah maka dibentuk sistem pusat kegiatan perkotaan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Tabel 1.4 Pembagian Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Wonogiri Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040

Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan	Fungsi	Lingkup Wilayah
PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, permukiman, transportasi, dan industry berada di seluruh kecamatan meliputi Kecamatan Wonogiri.	Kecamatan Wonogiri
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	Sebagai kawasan perdagangan, permukiman, pendidikan, dan pertanian.	Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Jatisrono, Kecamatan Sidoharjo
PPL (Pusat Pelayanan Kawasa)	Sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.	Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Puhpelem

Sumber : RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan

dengan masih terus mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan dalam pengembangan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat dikurangi(Sjafrizal,2012).

Ketimpangan pembangunan antar kecamatan merupakan hal yang terbiasa terjadi dikarenakan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang berbeda setiap daerah. Kabupaten Wonogiri yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan mempunyai tingkat pembangunan yang berbeda, baik dari segi fisik maupun materi. Dipandang dari aspek geografis, Kabupaten Wonogiri yang memiliki luas wilayah 182.236,02 ha yang meliputi 25 kecamatan dengan kondisi geografis berupa daerah pegunungan dan perbukitan karst memang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan. Banyaknya daerah yang berada pada daerah bukit-bukit dan terpencil tentu menyulitkan dalam pembangunan. Kabupaten Wonogiri hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, berbatuan dan kering membuat penduduknya lebih banyak merantau. Selain itu, kesenjangan mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri dimana persebaran jumlah penduduk yang tidak merata. Ketimpangan dalam jumlah penduduk ini akan berpengaruh terhadap PDRB masing-masing kecamatan, semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak yang diberdayakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi (Sri Purwaningsih,2014)

Supaya tidak terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan perlu adanya peran pemerintah dalam penanganan masalah ini, agar nantinya pembangunan dapat merata dan masyarakat menjadi makmur. Dari masalah di atas maka penulis bermaksud menganalisis tentang potensi dan daya saing tiap Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Wonogiri. Judul dari penelitian ini adalah **“EVALUASI PENENTUAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN WONOGIRI”**

1.2 Perumusan Masalah

Pengembangan kebijakan fungsi pusat pelayanan memiliki dua arah yaitu mengidentifikasi potensi ekonomi dan potensi wilayah. Untuk pengembangan tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui jawabannya, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tipologi pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimana interaksi ekonomi di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri ?
3. Kecamatan mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri ?
4. Bagaimana kesesuaian hasil penelitian dengan Sistem Perkotaan Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dibuat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tipologi pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisis interaksi ekonomi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
3. Mengidentifikasi kecamatan mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Wonogiri.
4. Mengevaluasi hasil penelitian dengan Sistem Perkotaan di Kabupaten Wonogiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengambil kebijakan pembangunan Kecamatan di daerah penelitian.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang mencakup tentang studi kewilayahan.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Penelitian

1.5.1.1 Ruang dan Pewilayahan

Bintarto (1987) menyatakan geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan antara manusia, ruang, ekologi, kawasan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dan kaitan antar komponen-komponen tersebut, melalui pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologi (*ecological approach*), dan pendekatan kompleks wilayah (*region complex approach*), untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Menguraikan definisi ilmu geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, maka akan muncul 9 tema dalam pendekatan keruangan dalam kajian geografi sebagai ciri ilmu dan pengajaran geografi. Kesembilan tema dalam analisis keruangan antara lain:

- a. Analisis Pola Keruangan, penekanan utama dari analisis ini adalah pada sebaran elemen-elemen pembentuk ruang. Tahap awal adalah identifikasi mengenai aglomerasi sebarannya dan kemudian dikaitkan dengan upaya untuk menjawab *geographic question*, antara lain: *What, Where, When, why, Who, dan How*.
- b. Struktur Keruangan, menekankan pada analisis susunan elemen-elemen pembentuk ruang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa struktur elemen-elemen keruangan dapat dikemukakan dari berbagai fenomena baik fenomena fisik maupun non fisik
- c. Analisis Proses Keruangan, menekankan pada proses keruangan yang biasanya divisualisasikan pada perubahan ruang. Perubahan elemen-elemen pembentuk ruang dapat dikemukakan secara kualitatif dan kuantitatif. Setiap analisis perubahan keruangan tidak dapat dilaksanakan tanpa mengemukakan dimensi kewaktuannya, maka dimensi temporal mempunyai peranan utama dalam hal ini.
- d. Analisis Interaksi Keruangan, menekankan pada interaksi antar ruang. Hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan yang

lain mempunyai variasi yang sangat besar, sehingga upaya mengenali factor-faktor pengontrol interaksi menjadi sedemikian penting. Tahap kemudian adalah menjawab mengapa terjadi interaksi dan bagaimana interaksi tersebut terjadi.

- e. Analisis Organisasi Keruangan, bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen lingkungan mana yang berpengaruh terhadap terciptanya tatanan spesifik dari elemen-elemen pembentuk ruang. Penekanan utamanya pada keterkaitan antara kenampakan yang satu dengan yang lain serta keterkaitan / hubungan antar elemen dan hierarki peranan elemen secara individual.
 - f. Analisis Asosiasi Keruangan, bertujuan untuk mengungkapkan terjadinya asosiasi keruangan antara berbagai kenampakan pada suatu ruang. Apakah ada keterkaitan fungsional atas sebaran keruangan atau gejala tertentu dengan sebaran keruangan gejala yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya asosiasi keruangan antara variable satu dengan variable lain dapat dilaksanakan dengan analisis yang mendasarkan pada visualisasi data pada peta ataupun dapat dilaksanakan dengan metode analisis statistic.
 - g. Analisis Komparasi keruangan, merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau keunggulan suatu ruang dibandingkan dengan ruang yang lain. Hal ini sangat penting dilaksanakan dalam studi banding yang mendalam mengenai suatu wilayah dalam rangka mempelajari kelebihan-kelebihan wilayah lain untuk digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan wilayah, sehingga wilayahnya dapat mengalami kemajuan yang lebih besar.
 - h. Analisis Kecenderungan Keruangan, adalah suatu analisis yang menekankan pada upaya mengetahui kecenderungan perubahan suatu gejala. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan *space based analysis*, *time based analysis* maupun gabungan antara keduanya.
- Analisis Sinergitas Keruangan, merupakan perkembangan baru

yang saat ini menjadi sorotan ilmu pengetahuan, karena sangat terkait dengan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan komunikasi. Makin majunya system transportasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya mobilitas barang,jasa, informasi yang semakin tinggi pula, sehingga dinamika keruangan semakin tinggi pula (Yunus, 2010).

Mewujudkan analisis yang baik dan harmonis, konsep wilayah digunakan sebagai representasi ruang. Dalam hal ini,wilayah diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu tergantung dari tujuan analisis. Menurut Ernani Rustiadi dkk. (2011) membagi konsep wilayah menjadi tiga yaitu: (1) wilayah *homogeny (uniform)*, (2) wilayah sistem/ fungsional, dan (3) wilayah perencanaan / pengelolaan (*planning region atau programing region*). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan terdapat konsep wilayah administratif-politis dan konsep wilayah fungsional (Lutfi Muta'ali,2011).

Pewilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Tujuan pewilayahan dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan wilayah bertujuan:

1. Menyebarkan pembangunan-pembangunan sehingga dapat dihindarkan terjadinya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu.
2. Menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan yang ada didaerah-daerah.
3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan, bukan saja pada aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi juga kepada masyarakat umum dan kepada pengusaha (Sumarmi,2012).

1.5.1.2 Disparitas Wilayah

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan itu, Ardani (1992) mengemukakan bahwa kesenjangan/ ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan.

Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyard, 1999).

1.5.1.3 Teori Lokasi Pertumbuhan

Teori lokasi pertumbuhan merupakan cabang ilmu ekonomi regional paling tua yang dikembangkan sejak abad kesembilan belas oleh H.W. Richardson (1979). Teori ini diilhami oleh pertanyaan Weber, yaitu pertanyaan mengapa pabrik-pabrik cenderung berlokasi saling berdekatan. Teori lokasi adalah teori yang menjelaskan di mana dan bagaimana suatu aktivitas ekonomi memilih lokasinya secara optimal. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah penting bagi para pengambil keputusan publik, perencana lembaga-lembaga perdagangan eceran (yang ingin membuat pilihan lokasi yang tepat) maupun pengembang-pengembang komonitas serta real estate, yang berharap untuk dapat menarik bisnis ke kawasan-kawasan mereka (Soepono dalam Sutikno dan Maryati, 2007).

Lokasi perusahaan-perusahaan atau kegiatan ekonomi memerankan peranan penting bagi lokasi daerah/kota. Keputusan-keputusan lokasi perusahaan-perusahaan dan aktivitas ekonomi seharusnya menyebabkan timbul dan berkembangnya kota-kota dan daerah-daerah. Faktor-faktor lokasi

menurut Soepono, dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi yaitu, pertama, orientasi transportasi, yang dimaksud dengan orientasi transportasi adalah bahwa transportasi merupakan porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu aktivitas ekonomi, sehingga menjadi penentu keputusan lokasi. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi transportasi antara lain; factor transportasi, faktor sumberdaya, faktor pasar, dan faktor tenaga kerja. Kedua, orientasi masukan lokal, yang dimaksud dengan orientasi masukan lokal adalah bahwa masukan lokal itulah yang merupakan persentase terbesar dari biaya total dan disebut lokal bila input itu tidak dapat secara efisien diangkut dari lokasi satu ke lokasi lain.

1.5.1.4 Pusat Pertumbuhan

Teori “*growth pole*” Poernomosidi (1974) meng-introdukir suatu konsep pengembangan wilayah, yang disebut Satuan Wilayah Ekonomi. Wilayah yang berada dalam jangkauan pelayanan suatu kota atau dengan kata lain, yang tercakup dalam wilayah pengaruh kota tersebut dianggap sebagai suatu “satuan wilayah” yang berdiri sendiri dan dinamakan (satuan wilayah ekonomi).

Poernomosidi (1974) mulai dengan pendapat bahwa sumber daya alam letaknya tersebar-sebar, begitu pula konsumen akhir. Dengan demikian derajat penyebarannya yang dihadapi jasa distribusi menjadi bertam bah besar; disebabkan karena pertimbangan efisiensi terbentuklah simpul-simpul jasa distribusi. Simpul-simpul ini merupakan titik tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kot, menurut konsiderasi ekonomi. Dalam hubungan itu, kota mempunyai fungsi pelayanan pemasaran terhadap wilayah sekitarnya, sehingga antar kota terjalin hubungan fungsional yang menampakkan hubungan hirarkis dan menunjukkan arah geographis tertentu. Kota-kota yang terkait dalam suatu hubungan hirarkis, beserta wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya, inilah yang membentuk suatu satuan wilayah, yang disebut satuan wilayah ekonomi dan kemudian lebih dikenal dengan “Satuan Wilayah Pengembangan”, atau disingkat SWP.

Suatu SWP terdapat satu kota yang berstatus lebih tinggi atau disebut Orde-I. Kota-kota selebihnya berstatus Orde-II, Orde-III dan seterusnya. Kota yang berstatus Orde-II berada dalam sub-ordonasi kota berstatus Orde-I, dalam fungsi pelayanan pemasaran terhadap wilayah sekitarnya. Kota Orde-III berada dalam sub-ordonasi kota berstatus Orde-II dan begitu seterusnya.

Adanya hirarkis pada hubungan fungsional antara kota yang terdapat dalam satuan SWP menggambarkan adanya “struktur” dalam proses pengembangan. Dengan memperhitungkan wilayah-wilayah yang berada dalam jangkauan pengaruh pelayanan kota-kota itu, diperoleh gambaran mengenai “struktur pengembangan wilayah”. Dalam hubungan ini bagian-bagian wilayah menampakkan pula hirarkis dalam hal kesempatan untuk pengembangannya, atau dengan kata lain bagian-bagiab wilayah menunjukkan hirarki dalam hal tingkat aksesibilitasnya yaitu tingkat ketersediaan dalam hal kebutuhan-kebutuhan hidup maupun kebutuhan-kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha.

Kota-kota disetiap SWP ini adalah yang dinamakan pusat-pusat pengembangan/pembangunan yang dapat menjangkau pelayanan wilayah sekitarnya dan diharapkan mempengaruhi perkembangan wialyah jangkauannya tersebut. Pusat pengembangan/pembangunan tersebut bukan terbatas pada kota-kota yang bersangkutan, tetapi dapat meliputi wilayah yang cukup luas, bahkan dapat merupakan desa, yang dapat pula ditumbuhkan di dalam satuan pemukiman transmigrasi sebagai unit terkecil dari Satuan Wilayah Pengembangan (Poernomosidi, 1974).

Ketidakhomogennya wilayah dalam suatu daerah baik dalam jumlah penduduk, iklim, cuaca bahkan fasilitas sosial dan ekonomi menyebabkan adanya daerah nodal dan spasial. Pada daerah nodal biasanya lebih cepat bertumbuh daripada wilayah belakangnya dikarenakan pada daerah nodal memiliki keuntungan agglomerasi ekonomi dan distribusi penduduk yang terpusat. Akan tetapi tidak semua daerah nodal tersebut mengalami pertumbuhan secara merata tetapi sering terdapat titik-titik yang menjadi pendorong perkembangan kegiatan daerah nodal yang dinamakan sebagai

pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk mempercepat peningkatan pendapatan terdapat suatu keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa pusat kekuatan ekonomi dalam suatu negara atau daerah (Perroux dalam Adisasmita, 2005).

Richardson menyatakan yang menyebabkan terjadinya pusat pertumbuhan dikarenakan adanya keuntungan agglomerasi yang didapat dari keputusan untuk berlokasi pada tempat yang terkonsentrasi. Keuntungan agglomerasi ini didapat karena adanya keuntungan skala yang berasal dari antara lain; fasilitas-fasilitas perbankan, sosial, pemerintahan, pasar tenaga kerja, perusahaan jasa-jasa khusus tertentu (Richardson dalam Paul Sihotang, 2001:96). Para pemilik modal akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah aglomerasi, sehingga menyebabkan industri – industri menjadi terpusat di daerah ini terutama industri inti (dalam skala besar). Industri inti mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah (Perroux dalam Adisasmita, 2005).

Robinson (2010) menyatakan pusat pertumbuhan dapat diartikan melalui dua cara, yakni pendekatan fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan merupakan sekelompok usaha atau kegiatan ekonomi lainnya yang terkonsentrasi pada suatu daerah dan memiliki hubungan yang dinamis, dan saling mendorong sehingga dapat mempengaruhi perekonomian daerah itu maupun daerah belakangnya. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas sehingga menjadi pusat daya tarik bagi berbagai macam dunia usaha.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Refika Ardila (2012) dengan penelitian Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan, interaksi antar kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya, kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis Skalogram dan teknik analisis Gravitasi dengan hasil penelitian yaitu;

analisis skalogram akan menghasilkan tingkat hirarki dari jumlah jenis fasilitas dimana kecamatan dengan hirarki yang lebih tinggi akan berfungsi melayani kecamatan-kecamatan yang berhirarki lebih rendah. Hasil analisis Gravitasi 1) Kecamatan Banjarnegara hinterland Kecamatan Purwanegara, Bawang. 2) Kecamatan Madukara hinterland Kecamatan Puwanegara, Bawang, Banjarnegara, Penedongan, Sigaluh. 3) Kecamatan Puwanegara hinterland Kecamatan Sususkan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Bawang, Banjarnegara. 4) Kecamatan Mandiraja hinterland Kecamatan Susukan, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Punggelan. 5) Kecamatan Purwareja Klampok hinterland Sususkan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Punggelan. 6) Kecamatan Susukan hinterland Kecamatan Purwareja Klampok, Mandiraja.

Okto Kurniawan TB Sirojuzilam (2015) dengan penelitian yang berjudul Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Singkil, bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Singkil. Penelitian ini menggunakan metode analisis Tipologi Klassen dan Location Quotient (LQ) dengan hasil penelitian yaitu; hasil analisis LQ menunjukkan bahwa dari 2 sektor unggulan berdasarkan PDRB Singkil yaitu pertanian dan perdagangan, hotel, dan restoran yang nilai LQ nya (>1) berarti merupakan sektor unggulan dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Provinsi Aceh, dan begitu juga dengan hasil analisis LQ sub sektor yaitu kehutanan dan perdagangan besar, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari tahun 2006-2011 nilai LQ nya (>1) juga merupakan sub sektor unggulan paa PDRB Kabupaten Singkil. Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Kabupaten Singkil Adalah daerah cepat maju dan cepat tumbuh, karena rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Singkil lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh, dan PDRB perkapita Kabupaten Singkil juga lebih tinggi dari PDRB perkapita Privinsi Aceh.

Pipit Fitria Cika Paramita (2020) meneliti Evaluasi Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi, mengetahui kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan, dan interaksi antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan yaitu; Analisis Tipologi Klassen, Analisis Skalogram, Analisis Gravitasi. Hasil dari ketiga analisis tersebut akan dibandingkan dengan hasil SWP Kabupaten Wonogiri, dimana penelitian sesuai atau tidak dengan pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu cara penggunaan metode analisis pada penelitian ini dan pada penelitian ini untuk hasil akhirnya dievaluasi dengan Satuan Wilayah Perkembangan di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 1.5 Perbandingan Antar Penelitian

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Refika Ardila (2012)	Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan, interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya, kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.	Metode yang digunakan metode teknik analisis Skalogram dan Gravitasi	Analisis skalogram akan menghasilkan tingkat hirarki dari jumlah jenis fasilitas dimana Kecamatan dengan hirarki yang lebih tinggi akan berfungsi melayani kecamatan-kecamatan yang berhirarki lebih rendah. Hasil analisis Gravitasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Banjarnegara hinterland Kecamatan Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Madukara, Banjarnegara. 2. Madukara hinterland Kecamatan Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Pagedongan, Sigaluh. 3. Purwanegara hinterland Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Bawang, Banjarnegara. 4. Mandiraja hinterland Kecamatan Susukan, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Punggelan. 5. Purwareja Klampok Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Punggelan.

Lanjutan Tabel 1.5 Perbandingan Antar Penelitian

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Okto Kurniawan TB Sirojuzilam (2015)	Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Singkil	Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kab.Singkil.	Metode yang digunakan teknik analisis Tipologi Klassen dan Location Quotient (LQ).	<p>Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa dari 2 sektor unggulan berdasarkan PDRB Singkil yaitu pertanian dan perdagangan,hotel,dan restoran yang nilai LQ nya (>1) berarti merupakan sektor unggulan dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Provinsi Aceh, dan begitu juga dengan hasil analisis LQ sub sektor yaitu kehutanan dan perdagangan besar, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari tahun 2006-2011 nilai LQ nya (>1) juga merupakan subsektor unggulan pada PDRB Kab.Singkil.</p> <p>Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Kab.Singkil adalah daerah cepat maju dan cepat tumbuh, karena rata-rata Pertumbuhan PDRB Kab.singkil lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh, dan PDRB perkapita Kab.Singkil juga lebih tinggi dari PDRB perkapita Provinsi Aceh</p>

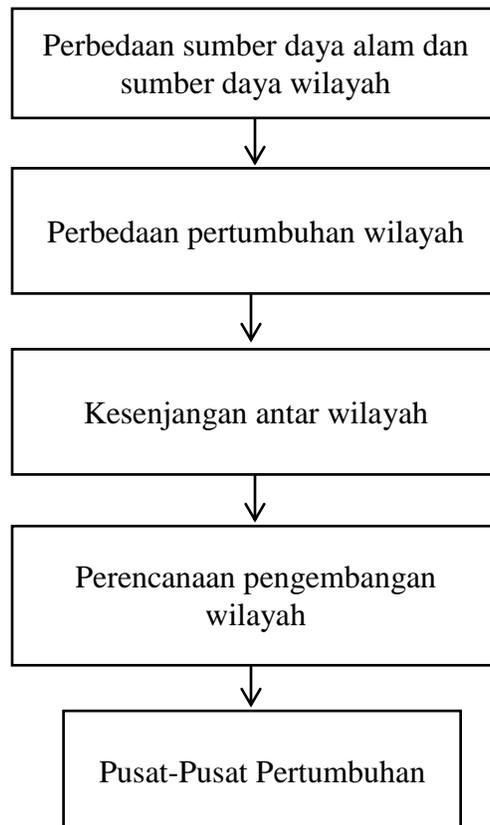
Lanjutan Tabel 1.5 Perbandingan Antar Penelitian

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Pipit Fitria Cika Paramita (2020)	Evaluasi Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonogiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi tipologi pertumbuhan ekonomi 2. Menganalisis interaksi ekonomi 3. Mengidentifikasi kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan 4. Evaluasi penentuan pusat pertumbuhan dengan SWP Kabupaten Wonogiri 	Metode yang digunakan teknik analisis Tipologi Klassen, Skalogram, dan Gravitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. – Kuadran I: Kec. Tirtomoyo, Kec. Baturetno, Kec. Selogiri, Kec. Wonogiri, Kec. Ngadirojo, Kec. Sidoharjo, Kec. Purwanto, Kec. Jatisrono <ul style="list-style-type: none"> - Kuadran II: Kec. Giritontro, Kec. Eromoko, Kec. Wuryantoro, Kec. Manyaran, Kec. Bulukerto, Kec. Slogohimo - Kuadran III : Kecamatan Paranggupito - Kuadran IV : Kec. Paranggupito, Kec. Giriwoyo, Kec. Batuwarno, Kec. Karangtengah, Kec. Nguntoronadi, Kec. Jatiroto, Kec. Kismantoro, Kec. Puhpelem, Kec. Jatipurno, Kec. Girimatyo 2. Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan analisis Gravitasi yaitu Kecamatan Wonogiri dengan interaksi sebesar 217.298.874,29

Sumber : Penulis, 2020

1.6 Kerangka Penelitian

Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya wilayah dapat mempengaruhi potensi suatu daerah. Daerah yang memiliki sumberdaya alam rendah dapat mengakibatkan perbedaan pertumbuhan wilayah dikarenakan penduduk disekitar tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Adanya perbedaan pertumbuhan wilayah tentu saja mengakibatkan adanya kesenjangan antar wilayah sehingga perlu adanya rencana pengembangan wilayah sehingga akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.



Gambar 1.1 Diagram Konsep

Sumber : Penulis 2020

1.7 Batasan Operasional

- a. Analisis Gravitasi adalah analisis yang digunakan untuk menghitung interaksi antar kota.
- b. Analisis Skalogram adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah.
- c. Analisis Tipologi Klassen adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
- d. Fasilitas pelayanan ekonomi adalah segala bentuk pelayanan yang diselenggarakan pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau nyata sesuai dengan fungsi pelayanan ekonomi ada penggunaannya (Conyers, 1991). Penelitian ini fasilitas ekonomi meliputi Perdagangan (swalayan, pasar, pertokoan, rumah makan, kios, dan hotel) dan keuangan perbankan (BRI, Bank umum, BPR, BKK, dan koperasi).
- e. Fasilitas pelayanan sosial adalah pelayanan yang diberikan pemerintah atau diarahkan oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkat kehidupan penduduk (Human, 1987). Penelitian ini fasilitas pelayanan sosial meliputi fasilitas pendidikan (PT, SLTA, SMP, SD, dan TK), Kesehatan (RS, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas pembantu) dan tempat ibadah (Masjid, Gereja, Vihara/Kuil, dan Mushola).
- f. *Potensi* adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan (KBBI).
- g. *Potensi Wilayah* adalah segala sesuatu yang dimiliki suatu wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan sehingga mampu memberi nilai tambah pada daerah tersebut.
- h. *Pusat Pertumbuhan* adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mampu mempengaruhi kawasan – kawasan lain disekitarnya (Sjafrizal,2012).

- i. Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer tempat hidup manusia, tumbuhan, dan hewan.
- j. *Wilayah* didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya dimana komponen - komponen tersebut memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengolaan sumberdaya pembangunan (*Yunus, 1991*).
- k. Pengembangan Wilayah adalah suatu gerakan sebagian ataupun menyeluruh guna meningkatkan fungsi lahan dan penataan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat untuk memajukan daerah.
- l. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya.